

**PERAN *ISLAMIC MILITARY COUNTER-TERRORISM COALITION***  
**TERHADAP PENANGGULANGAN AKSI TERORISME DI**  
**AFGHANISTAN TAHUN 2017 – 2019**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh:**

**Triokta Pela**

**16323066**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**  
**FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2020**

**PERAN *ISLAMIC MILITARY COUNTER-TERRORISM COALITION***

**TERHADAP PENANGGULANGAN AKSI TERORISME DI**

**AFGHANISTAN TAHUN 2017 – 2019**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh :

**TRIOKTA PELA**

**16323066**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERAN *ISLAMIC MILITARY COUNTER-TERRORISM COALITION*  
TERHADAP PENANGGULANGAN AKSI TERORISME DI  
AFGHANISTAN TAHUN 2017-2019**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

~~14 September 2020~~

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



(Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A)

NIK. 123230101

Dewan Penguji:

- 1 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
- 2 Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A.
- 3 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.

## PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

### PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Triokta Pela  
No. Mahasiswa : 16323066  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Judul Skripsi : Peran Islamic Military Counter-Terrorism Coalition Terhadap Penanggulangan Aksi Terorisme di Afghanistan Tahun 2017-2019

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindak pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan hanya karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melakukan pelanggaran etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yang Menyatakan,

METERAI  
TEMPEL  
AD0CEAHF590546684  
6000  
EKAM BELAS RUPIAH  
Triokta Pela

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya ini saya persembahkan untuk:

### Kedua Orang Tua

Atas segala dukungan yang selalu diberikan kepada saya dalam segala hal yang saya lakukan, serta doa yang selalu mengiringi perjalanan saya hingga saat ini. Pengorbanan dan perjuangan kalian yang telah menuntun penulis hingga saat ini dan seterusnya.

### Kedua Abangku

Atas segala dukungan dan doa yang selalu diucapkan kepada penulis.

### Keluarga di Yogyakarta

Atas dukungan dan bantuan selama penulis melakukan penelitian

## HALAMAN MOTTO

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal hal itu tidak menyenangkan bagimu.

Terapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal hal itu baik bagimu,

dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

**QS Al-Baqarah ayat 216**

“Appear weak when you are strong, and strong when you are weak”

**Sun Tzu**



## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur tak terhingga kepada Allah Subhannahu wa ta'alla yang Maha pengasih dan Maha penyayang atas nikmat dan rahmat-Nya, serta segala kekuatan, kemudahan dan kelancaran sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salah tak lupa selalu diucapkan kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Rasa syukur yang sangat besar bagi saya selaku peneliti atas rahmat dan hidayah dari Allah yang telah memberikan segala nikmatnya saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Dalam penelitian ini, penelitimenyadari bahwa banyak pihak yang turut membantu memberikan saran, motivasi, Bantuan dan bimbingan. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia dan selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis. Semoga bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A. selaku Sektretaris Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia dan Dosen

Pembimbing Skripsi atas segala bantuan bapak membimbing penulis dalam menyelesaikan studi di Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Terima Kasih atas segala bantuan bapak. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak.

3. Seluruh dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia yang telah membagikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan. Semoga kebaikan bapak dan ibu dosen dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang baik.
4. Seluruh karyawan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
5. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa, dukungan, kepercayaan dan motivasi untuk penulis dalam setiap keputusan yang penulis buat.
6. Kedua abangku dan kakak yang selalu memberikan dukungan selama ini hingga tulisan ini selesai dikerjakan oleh penulis. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada abang dan kakak semua.
7. Keluarga di Jogja di Yogyakarta, Taufiq, Yafie, Ahmad Assegaff, Amin, Rezi, Dika, Roti, Bagas, Ridho Levi, Bibi, Mahendra Jo, Odi, Syauqi, Najla, Malinda, Fira, Dini, Ramadha. Terima kasih atas waktu dan dukungan yang sudah



diberikan selama ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan teman-teman semua.

8. *Board of Executive KOMAHI UII* 2019, Rozi, Ahmad, Asti, Fira dan Alma.

Terima kasih sudah memberikan kepercayaan selama ini kepada penulis.

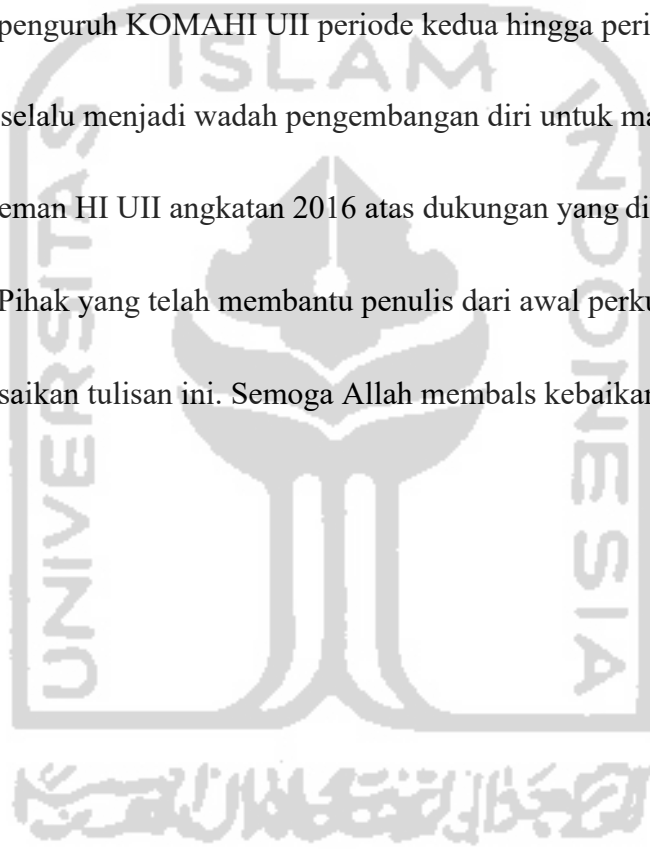
Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

9. Seluruh pengurus KOMAHI UII periode kedua hingga periode keempat.

Semoga selalu menjadi wadah pengembangan diri untuk mahasiswa HI UII.

10. Teman-teman HI UII angkatan 2016 atas dukungan yang diberikan.

11. Seluruh Pihak yang telah membantu penulis dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan tulisan ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian.



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Signifikansi Penelitian.....	6
1.5 Cakupan penelitian.....	6
1.6 Tinjauan Pustaka.....	7
1.7 Landasan Teori/Konsep/Model.....	12
1.8 Metode Penelitian.....	18
1.8.1 Jenis Penelitian.....	18
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	18
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	19
1.8.4 Proses Pengumpulan Data.....	19
BAB II.....	21
SEJARAH KELOMPOK TALIBAN DAN ISLAMIC MILITARY COUNTER- TERRORISM COALITON DAN POSISI KEDUANYA DALAM DUNIA	viii

INTERNASIOANAL.....	21
2.1 Kelompok Taliban.....	21
2.1.1 Awal kemunculan Taliban .....	21
2.1.2 Pemerintahan Taliban.....	23
2.1.3 Posisi Taliban dalam dunia Internasional.....	24
2.2 Islamic Military Counter-Terrorism Coalition.....	26
2.2.1 Islamic Military Couter-Terrorism Coalition.....	26
2.2.2 Islamic Military Counter-Terrorism dan Afghanistan .....	33
BAB III .....	38
PERAN ISLAMIC MILITARY COUNTER-TERRORISM COALITION TERHADAP AKSI TERORISME DI AFGHANISTAN TAHUN 2017-2019 ...	38
3.1 Analisis Konsep Peranan Karen Mingst.....	38
3.1.1 Analisis level With Respect to States.....	41
3.2 Analisis Fungsi Islamic Military Counter-Terrorism Coalition menurut konsep Clive Archer.....	46
3.2.1 Artikulasi dan Agregasi.....	47
3.2.2 Sosialisasi.....	47
3.2.3 Informasi .....	48
BAB IV .....	49
PENUTUP.....	49
4.1 Kesimpulan .....	49
4.2 Saran dan Rekomendasi .....	51
Daftar Pustaka .....	xiii

## Daftar Singkatan

AS	: Amerika Serikat
IMCTC	: Islamic Military Counter-Terrorism Coalition
NATO	: The North Atlantic Treaty Organization
PBB	: Perserikatan Bangsa-bangsa



## **Abstrak**

Pada tahun 2015 Arab Saudi menginisiasikan pembentukan satu koalisi Islam untuk menanggulangi keberadaan kelompok terorisme di dunia Islam (Brief History, 2016). Keanggotaannya hanya untuk negara-negara Islam yang ada di dunia. tercatat 41 negara Islam bergabung di dalam koalisi Islam anti terorisme ini. negara anggota adalah negara yang berasal dari kawasan timur tengah, Afrika, Asia selatan dan Asia tenggara. pembentukan koalisi negara Islam ini menjadi salah satu aksi negara-negara Islam dunia dalam menanggapi maraknya aksi terorisme di dunia. Tujuan utama dari koalisi ini adalah untuk meningkatkan kontribusi dari negara Islam dalam isu keamanan dan perdamaian serta memberikan pandangan kepada dunia internasional bahwa terorisme tidak hadir dari negara-negara Islam yang bergabung di dalam koalisi ini. tidak hanya melalui bantuan militer, koalisi ini nantinya akan memberikan bantuan kepada anggotanya melalui bantuan di bidang ideologi, komunikasi, keuangan anti terorisme dan nantinya dapat menjaga perdamaian dunia (Strategic Vision, 2016).

**Kata Kunci:** Terorisme, Arab Saudi, koalisi Islam

## **Abstract**

*In 2015, Saudi Arabia initiated of an Islamic Coalition for counter-terrorism purpose in the Islamic World. It only allow Islamic States countries to join the coalition. It consist of 41 Islamic countries around the world join the Islamic Coalition for counter-terrorism. Member countries from around the world such as, Middle East, Africa, South Asia and Southeast Asia. The main objective of this coalition to increase the contribution of Islamic countries in issues of security and peace to provide the view from the international community that the terrorist group does not exist from Islamic countries that are the member of this coalition. Not only from military assistance, Islamic Military Counter Terrorism Coalition provide assistance in the field of ideology, communication, counter terrorism financing in order to secure the world peace.*

**Keywords:** Terrosism, Saudi Arabia, Islamic Coalition

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Pada tahun 2015 Arab Saudi menginisiasikan pembentukan satu koalisi Islam untuk menanggulangi keberadaan kelompok terorisme di dunia Islam (Islamic Military Counter-Terrorism Coalition, 2016). Keanggotaannya hanya untuk negara-negara Islam yang ada di dunia. tercatat 41 negara Islam tergabung di dalam koalisi Islam anti terorisme ini. Negara anggota adalah negara yang berasal dari kawasan Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan dan Asia Tenggara. Pembentukan koalisi negara Islam ini menjadi salah satu aksi negara-negara Islam dunia dalam menanggapi maraknya aksi terorisme di dunia. Koalisi Islam ini juga berbasis kepada kerja sama yang nantinya dilakukan oleh negara anggota. Tahun 2016 dalam pertemuan Menteri pertahanan dari koalisi ini, koalisi ini juga memaparkan bahwa pentingnya koalisi Islam dalam memerangi terorisme dan mempertahankan kedaulatan Islam yang moderat, damai dan menjunjung toleransi.

Tujuan utama dari koalisi ini adalah untuk meningkatkan kontribusi dari negara Islam dalam isu keamanan dan perdamaian serta memberikan pandangan kepada dunia internasional bahwa terorisme tidak hadir dari negara-negara Islam yang tergabung di dalam koalisi ini. Tidak hanya melalui bantuan militer, koalisi ini nantinya akan memberikan bantuan kepada anggotanya melalui bantuan di

bidang pembekalan ideologi, komunikasi, keuangan anti terorisme dan nantinya dapat menjaga perdamaian dunia (Strategic Vision, 2016).

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi dari koalisi ini, 41 negara sepakat untuk mendukung setiap negara dalam melakukan pencegahan aksi terorisme di setiap negara anggota. Negara Islam yang eksis saat ini harus melakukan banyak perubahan demi terwujudnya Islam yang damai dan moderat. Setelah serangkaian aksi dari kelompok Al-Qaeda di Amerika Serikat pada tahun 2001, dunia melihat agama Islam sebagai agama yang penuh dengan dendam dan kebencian. Atas aksi Al-Qaeda ini, masyarakat muslim yang berada di kawasan Timur Tengah dan kawasan Asia Selatan menjadi kacau atas campur tangan tentara Amerika Serikat di negara mereka.

Salah satu negara yang menjadi tempat operasi militer tentara Amerika Serikat adalah Afghanistan. Afghanistan dikabarkan menyembunyikan pemimpin Al-Qaeda pasca serangan yang mereka lakukan di New York. Adanya kelompok ekstremis Taliban yang merupakan kelompok dengan semangat yang sama dengan Al-Qaeda tentu memberikan kekuatan yang baik bagi kedua kelompok ini. Taliban berusaha membantu untuk menyelamatkan pemimpin Al-Qaeda dari buruan tentara Amerika Serikat (Haqqani, 2019). Taliban diketahui ingin mendirikan negara Islam untuk masyarakat Afghanistan dan menolak demokrasi yang berkembang di negara tersebut. Taliban tercatat pernah menduduki kursi pemerintahan negara sampai dengan Amerika Serikat datang ke Afghanistan. Hal ini tentu saja membuat

kelompok ini tidak terlalu senang dengan kehadiran Amerika Serikat di negara mereka.

Taliban sering kali melakukan aksi teror terhadap warga Afghanistan dan tentara Amerika Serikat yang bertugas di negara mereka. Hingga tahun 2019, Taliban masih saja melakukan aksi teror seperti bom mobil, bom bunuh diri bahkan bom jarak jauh dengan alat yang mereka miliki. Menurut data *Global Terrorism Index* tahun 2018 yang di sebarakan oleh *Institute for Economics & Peace*, Afghanistan merupakan negara pertama yang terdampak aksi terorisme di dunia. hal ini menjadikan Afghanistan sebagai negara paling berbahaya di dunia hingga tahun 2019 (*Institute for Economics & Peace*, 2019). Dalam perjalanannya, Taliban terus berusaha untuk menentang pemerintahan negara Afghanistan demi terwujudnya misi mereka. Kegaduhan yang terjadi di Afghanistan terdengar hingga ke negara tetangga. Negara kawasan Teluk sepakat untuk mendukung pemerintahan Afghanistan dalam mempertahankan kedaulatan negara Afghanistan. Bahkan negara-negara teluk Persia memberikan sanksi terhadap siapa saja yang memberikan bantuan kepada kelompok itu (*VOA Indonesia*, 2018).

Pada tahun 2017, berbagai aksi di lakukan oleh kelompok Taliban. Salah satu aksinya, kelompok ini berhasil memasuki wilayah markas militer Afghanistan. 150 tentara Afghanistan terbunuh oleh aksi Taliban ini ( *Tirto*, 2017). Dalam catatan *Global Terrorism Index*, lebih dari 15 serangan teroris terjadi di wilayah Afghanistan. Deretan aksi yang terjadi di Afghanistan ini di lakukan oleh kelompok Taliban. Penyerangan yang di lakukan oleh Taliban pada 18 Maret 2019 di pos



perbatasan berhasil menahan 58 tentara perbatasan yang dikabarkan menyerahkan diri kepada Taliban (Yasinta, 2019)

Dalam pertemuan para Menteri Pertahanan negara anggota pada tahun 2017, delegasi Afghanistan dalam sambutannya menyebutkan bahwa pemerintahan Afghanistan saat itu sedang mempertahankan negara mereka dari berbagai ancaman pertahanan. Ancaman ini datang dari kelompok terorisme yang memiliki jaringan anggota sangat luas yaitu Taliban. Pemerintahan Afghanistan akan terus melawan Taliban melalui jalur diplomatic, ekonomi serta tekanan militer. Pemerintahan Afghanistan sadar bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh aksi terorisme sudah sangat banyak. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Afghanistan memberikan beberapa pandangan yang berkaitan dengan pemberantasan terorisme. Afghanistan menginisiasikan untuk membentuk kerjasama intelijen agar data-data terkait terorisme dapat tersebar ke berbagai negara anggota. Permintaan untuk memberantas keuangan teroris yang ada di Afghanistan juga disampaikan dalam pertemuan tersebut (Islamic Military Counter-Terrorism Coalition, 2017).

Pada tahun 2018, Presiden Afghanistan bertemu dengan Sekretaris Jendral *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* di Gul Khan Palace, Afghanistan. Pertemuan ini membahas berbagai aspek kerja sama yang nantinya akan di lakukan. Dalam pertemuan ini, Presiden Ashraf Ghani dan Jendral Abdulelah al-Saleh membahas tentang upaya melawan kelompok teroris dan kelompok ekstremis, upaya pencegahan keuangan untuk kelompok teroris, kerja sama Militer dan proses perdamaian untuk Afghanistan. Jendral Abdulelah al-Saleh juga memberikan

dukungan penuh untuk pemerintahan Afghanistan dalam upaya melawan kelompok teroris (Asia News, 2018)

Eksistensi kelompok Taliban di negara Afghanistan sudah lebih dari 20 tahun. Hadirnya kelompok ini sebagai kelompok ekstremis terbesar di dunia menjadikan Islam sebagai agama yang buruk dan penuh dengan kekerasan. Penolakan kelompok ini atas perdamaian dengan Amerika Serikat sangat terlihat dengan aksi penyerangan dan pengeboman tentara Amerika Serikat di Afghanistan. *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* hadir sebagai juru damai untuk negara Afghanistan. Dengan visi untuk mengeratkan kontribusi negara Islam di dunia dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia, koalisi ini diharapkan dapat membantu negara Afghanistan sebagai negara dengan tingkat aksi terorisme tertinggi di dunia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* dalam menanggapi ancaman kelompok terorisme yang dihadapi oleh Afghanistan tahun 2017-2019?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran dari *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* di negara Afghanistan
2. Untuk mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition*

#### 1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari isu terorisme. Isu terorisme merupakan salah satu isu yang di bahas dalam bidang studi Hubungan Internasional. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui arah kebijakan yang digunakan oleh *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* dalam konflik di negara Afghanistan. Dengan mengetahui arah kebijakan *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition*, nantinya akan membantu penulis dalam memahami bagaimana keterlibatan serta peran koalisi ini dalam konflik Pemerintahan Afghanistan dengan kelompok ekstremis Taliban.

Proses ketika melakukan penelitian ini membutuhkan berbagai informasi yang nantinya akan dirangkai menjadi sebuah argumentasi. Argumentasi tersebut bisa berasal dari hasil pemikiran penulis yang mampu mendukung argumentasi yang didapatkan dalam penelitian kali ini. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan baru untuk meneliti peran *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* terhadap penanggulangan aksi terorisme di negara Afghanistan.

#### 1.5 Cakupan penelitian

Dalam upaya untuk membatasi pembahasan, penelitian ini fokus pada *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition*. negara yang diambil adalah Afghanistan. Fokus dari *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* adalah untuk mencegah berkembangnya kelompok dan ideologi ekstremis di dunia. Koalisi Islam ini juga ingin merubah pandangan bahwa Islam merupakan agama

yang penuh dengan rasa toleransi. Untuk membatasi tahun, penulis memulai dari tahun 2017 dan berakhir pada tahun 2019. Tahun ini di pilih karena peningkatan kasus kekerasan terorisme yang terjadi di Afghanistan sejak tahun 2017. Bahkan, dalam jurnal Global Terrorism Index, tercatat bahwa di tahun 2018 Afghanistan menjadi negara dengan tingkat kekerasan terorisme sangat tinggi di dunia.

## 1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam tulisan Jusuf Wanandi yang diterbitkan oleh *The MIT Press* yang berjudul *A Global Coalitions Against International Terrorism*, kebijakan Amerika Serikat untuk memberantas terorisme di dunia mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Amerika Serikat juga membuat sebuah koalisi dengan beberapa negara termasuk Tiongkok dan negara-negara Asia Tengah untuk melawan kelompok ekstremis Al-Qaeda. Koalisi yang tergabung dengan Amerika Serikat ini sepakat untuk memberi bantuan baik dari bantuan publik, kombatant negara serta informasi tentang terorisme yang mereka ketahui. Aksi pertama dari koalisi ini berhasil menggulingkan pemerintahan Taliban di negara Afganistan setelah hampir 6 tahun berkuasa di kursi pemerintah. Selain itu, Rusia tercatat bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk melakukan kerja sama dalam penanganan terorisme di dunia. Negara Pakistan Uzbekistan Tajikistan dan Kazakhstan bersedia memberikan informasi intelijen mereka dalam upaya mendukung koalisi. Pemimpin dari negara-negara islam di dunia juga menawarkan dukungan politik mereka. Negara-negara Islam sudah menjadi negara yang terkena dampak terbesar dari beberapa aksi terorisme didunia. Hal ini karena masyarakat dunia beranggapan bahwa kelompok ekstremis ini lahir dan diberikan pendanaan yang berasal dari

pemerintahan negara Islam, khususnya negara-negara Timur Tengah. Stigma yang sudah terbentuk memaksa negara Islam untuk bergerak dan bergabung dengan koalisi Amerika Serikat. Hal ini direspons sangat baik oleh Amerika Serikat. Dengan bantuan yang diberikan oleh negara Timur Tengah nantinya Amerika Serikat dapat memberikan pengaruhnya dalam rangka mengontrol persediaan minyak yang ada didunia (Wanandi, 2002).

Pada tahun 2015, Arab Saudi menginisiasikan untuk dibentuknya koalisi negara Islam dalam penanggulangan terorisme. pembentukan ini merupakan ide dari Raja Arab Saudi beserta Menteri Pertahanan negara tersebut. Sebagai negara Islam, Arab Saudi merasa sudah saatnya seluruh negara Islam bersatu untuk melawan terorisme. Stigma atas agama yang menjadikan Arab Saudi ingin membentuk koalisi Islam. Dalam tulisan Brian Michael Jenkins di tuliskan bahwa gerakan ekstremis muslim yang ada didunia saat ini hanya dapat diselesaikan oleh sesama pemeluk agama Islam. Di bentuknya koalisi Islam ini nantinya akan melakukan pendekatan dengan berbagai cara salah satunya pemahaman ideologi untuk kelompok ekstremis ini. Negara Arab Saudi sebagai salah satu negara besar yang berada dalam koalisi ini nantinya akan memberikan bantuan dari segi politik hingga finansial. Segala hal yang bersangkutan dengan penanganan terorisme akan menjadi fokus dari Arab Saudi dalam koalisi ini. Arab Saudi menilai bahwa keberadaan Amerika Serikat di Timur Tengah dalam rangka memerangi terorisme sudah tidak dapat di terapkan lagi untuk saat ini. Amerika Serikat sudah berada di Timur Tengah sejak tahun 2001. Namun kelompok terorisme tetap eksis hingga saat ini. Arab Saudi beranggapan bahwa diperlukannya pendekatan yang lebih

untuk kelompok terorisme, seperti pendekatan emosional keagamaan mereka. Beberapa pengamat politik Amerika Serikat bersikap skeptis dengan koalisi ini. Pasalnya, Arab Saudi sendiri hingga tahun 2015 belum bisa menghadapi kelompok ekstremis di negara sendiri dan Arab Saudi meminta agar para pemimpin negara Islam untuk bersatu melawan terorisme (Jenkins, 2016).

Dalam tulisan *The Cause and Threat of Terrorism*, aksi terorisme dapat terjadi ketika individu atau kelompok tersebut sudah tidak dapat lagi masuk dan memberikan aspirasi melalui jalur politik. Aspirasi mereka adalah yang menjadi tujuan akhir dari kelompok ini. Tujuan mereka ini kemudian menjadi di atas segala hal. Mereka tidak memandang korban yang akan berjatuh baik dari orang lain maupun dari kelompok mereka itu sendiri. Terdapat tiga alasan yang sangat mendasar dari eksisnya aksi terorisme saat ini. Pertama, kelompok ini tidak sepatutnya dengan cara lain selain cara yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan mereka. Kedua, mereka merasa bahwa dengan menggunakan cara dari pihak lain, tujuan mereka ini tidak akan berjalan semestinya dan akan menghabiskan waktu yang sangat lama. Ketiga, tindakan terorisme akan membuat unsur lain yang mungkin sulit untuk di dapatkan oleh kelompok ini yang berguna nantinya dalam rangka mencapai tujuan mereka. Sebenarnya dalam melakukan aksi terorisme ini menjadi salah satu pilihan terakhir bagi kelompok ekstremis saat ini. Kelompok Taliban pada akhir tahun 90an sudah mulai masuk ke dalam tingkat pemerintahan sebelum kemudian digulingkan oleh Amerika Serikat dalam kebijakan Presiden Bush yaitu *Government War on Terror* (Yamamoto, 2017).

Pada tahun 2014, negara-negara barat sangat gencar dalam melakukan penanggulangan aksi terorisme yang dilancarkan oleh kelompok ISIS. Kelompok ini tidak hanya menjadikan negara barat mengirimkan pasukan, namun juga melawan dengan militan-militan yang mereka miliki. Sejak tahun 2014 itu pula kelompok ISIS tidak hanya melakukan aksi di Irak dan dan Suriah, mereka juga melakukan aksinya di kawasan Eropa dan Amerika. Tercatat bahwa negara Amerika Serikat, Prancis dan Jerman termasuk ke dalam catatan hitam kelompok ISIS. Kelompok ini kemudian dianggap sebagai kelompok ekstremis yang berbahaya di dunia dan menjadi kelompok yang melawan koalisi militer Internasional. Selain berupaya untuk revolusi, kelompok ini juga melakukan propaganda melalui teknologi digital. Propaganda yang dilakukan sudah termasuk ke dalam propaganda profesional dan dianggap sangat serius bagi keamanan setiap negara didunia. Banyak orang kemudian bergabung ke dalam kelompok ini dalam rangka untuk "Jihad". Tidak hanya partisipan yang berasal dari kawasan Timur Tengah, kelompok ini juga dapat menarik pengikut dengan skala yang besar dari kawasan Eropa dan Asia. Kelompok terorisme saat ini masih menggunakan cara-cara yang dilakukan oleh kelompok sebelumnya. Koalisi militer internasional sudah mengetahui modus operandi yang digunakan oleh kelompok ini. Zona perang yang terfokus di Irak dan Suriah menjadikan ruang lingkup kelompok ini yang lebih kecil untuk zona perang. Namun, melalui propaganda digital, ajaran ideologi yang tersebar di seluruh dunia menjadikan kelompok ini sangat besar (Büggermann, 2017).

Dalam jurnal yang berjudul *Global Terrorism: Multilateral Responses to an Extraordinary Threat*, fenomena terorisme bukan hal yang baru. Fenomena ini sudah muncul sejak tahun 70an dikenal sebagai kelompok Ekstremis. Sejak tahun 2001, masyarakat dunia mengenal terorisme sebagai bagian dari agama Islam. Kelompok yang lahir dari negara-negara Islam dan dengan tujuan untuk menunjukkan eksistensinya, mereka melakukan aksi pemberontakan, pengeboman hingga pembunuhan. Untuk mencegah aksi dari kelompok ini tidak bisa hanya dengan kekuatan satu negara saja. Di perlukannya keseriusan dari setiap negara di dunia untuk mencegah aksi dari kelompok terorisme. Setelah Al-Qaeda melancarkan aksinya di wilayah Amerika Serikat yang dikenal sebagai peristiwa 9/11, mulai banyak timbul pertanyaan terkait dengan respons dunia internasional terkait aksi terorisme di dunia. Penyebab dari munculnya aksi terorisme terus menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Peneliti yang berasal dari dunia Timur menyebutkan bahwa penyebab dari munculnya aksi terorisme mencakup kepada dua aspek, yaitu aspek politik dan sosial ekonomi. Kelompok ini merupakan kelompok masyarakat yang hidup di atas kemiskinan, kegagalan politik di negara asal dan merupakan kaum yang termarginalkan dari aspek sosial ekonomi. Dunia Barat kemudian beranggapan bahwa kelompok ini muncul atas adanya kesenjangan, kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, modernisasi, lemahnya demokrasi, negara yang gagal dan hal ini sudah teridentifikasi sebagai penyebab dari kekerasan politik dan kelompok terorisme. Terorisme merupakan pasif aktor yang tidak bisa masuk di seluruh bagian dari masyarakat dunia. kelompok ini hanya akan muncul ketika seseorang atau bahkan kelompok mencoba untuk memberikan pemahaman yang baru dan hal itu tidak sesuai dengan ideologi dan visi mereka



sebagai kelompok (Rosand, 2017). Dari lima jurnal yang menjadi kajian pustaka, penulis belum menemukan tulisan mengenai peranan *Islamic Military Counter-Terrorism* pasca terbentuknya koalisi ini di tahun 2015. Dalam jurnal yang ditulis oleh Brian Michael Jenkins, terdapat satu pembahasan mengenai posisi koalisi ini dalam dunia internasional. Namun, tulisan ini lebih menggali tentang keterlibatan negara Arab Saudi sebagai negara Islam yang menjadi pemimpin dari koalisi ini. Setelah terbentuknya koalisi ini pada tahun 2015, masih belum ada kegiatan yang membahas mengenai kebijakan dari koalisi. Pada tahun 2017, pada pertemuan Menteri pertahanan setiap negara anggota, disepakati satu kebijakan untuk saling membantu negara anggota dalam hal pendanaan serta bantuan pasukan untuk negara anggota.

### **1.7 Landasan Teori/Konsep/Model**

Untuk menjawab rumusan masalah yang ada diperlukan suatu kerangka dasar dalam melakukan analisa berpikir. Dalam hal ini diperlukannya suatu teori atau konsep untuk menganalisa rumusan masalah yaitu konsep organisasi internasional. Organisasi internasional adalah organisasi antar negara yang diikat oleh perjanjian untuk menjamin tujuan utama dari organisasi tersebut. Menurut Clive Archer, organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan anatar anggota (Pemerintahan atau non Pemerintahan) (Archer, 2001). Tujuannya untuk mengejar dan mencapai kepentingan Bersama para anggotanya.

Dalam jurnal yang berjudul *International Organization The Politics and Processes of Global Governance*, dituliskan bahwa Intergovernmental Organization merupakan suatu organisasi yang terdiri dari setidaknya 3 negara di dalamnya. Selain itu, organisasi internasional dibentuk atas keresahan atau kesepakatan terhadap suatu hal. Kemudian organisasi ini harus memiliki kantor pusat, pemimpin dari organisasi, birokrasi yang baik dan dana untuk membantu setiap kegiatan atau operasi yang akan dilakukan oleh organisasi (Margaret P. Karns, 2015).

Dalam dunia internasional tidak ada sebuah negara yang mampu menjalankan negaranya tanpa membutuhkan negara lain. Hal ini menjadi satu alasan penting terjadinya kerjasama internasional di dunia. Kerjasama yang dilakukn antara dua negara atau lebih merupakan suatu tindakan untuk memenuhi national interest dari suatu negara. Kerjasama ini nantinya akan memberikan pandangan baru terhadap negara terkait dengan kebijakan dalam dan luar negerinya. Kepentingan suatu negara merupakan unsur yang paling penting untuk dipenuhi karena hal ini meliputi pertahanan, keamanan, militer dan ekonomi.

Dalam buku yang berjudul *Contending Theoris*, James E. Dougherty mengungkapkan bahwa kerjasama internasional dilakukan dalam proses diplomasi dan perundingan yang diadakan karena masing-masing pihak sudah saling tahu atas kepentingan nasional masing-masing (Dougherty, 1971). Dalam dunia internasional saat ini kerjasama internasional merupakan suatu hal yang rutin dilakukan oleh setiap negara. Hal ini terjadi karena semakin banyak permasalahan yang ada, mulai dari bidang ekonomi, pertahanan keamanan dan politik.

permasalahan ini juga menjadi hal yang besar ketika melihat dari sisi kawasan regional atau internasional.

Kerjasama interternasional dapat dibagi menjadi dua bagian (T, 1998), yaitu:

1. Kerjasama Pertahanan-Keamanan (*Collective Security*)

Kerjasama pertahanan-keamanan meliputi upaya militer yang dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada warga masyarakatnya.

2. Kerjasama Fungsional (*Funcional Cooperation*)

Kerjasama ini mengarah kepada *imbalace cooperations* atau kerjasama yang tidak seimbang.

Kerjasama Internasioanl juga dijelaskan sebagai kerjasama dalam masyarakat internasional sebagai akibat dari hubungan interdependensia dan bertambah kompleksnya hubungan manusia dalam dunia internasinal. Kerjasama terjadi karena memiliki tujuan tertentu. Dalam mencapai tujuannya ini kemudian masyarakat menjalin hubungan demi memenuhi kebutuhannya.

Dalam buku yang ditulis oleh Karen Mingst, terdapat tiga peran organisasi internasional. Peranan ini dibagi atas tiga level analisis (Mingst, 2004). Pertama, dalam tatanan sistem international yaitu organisasi internasional berperan untuk membentuk kerjasama di antara negara anggota dalam menjalankan misi yang telah disepakati oleh setiap anggota. Organisasi internasional juga berfungsi untuk mengumpulkan informasi yang berguna untuk internal organisasi. Dalam rangka

untuk menciptakan perdamaian, organisasi internasional juga berperan untuk menjadi pihak yang netral dalam suatu perselisihan.

Level analisis kedua adalah tingkatan organisasi internasional sehubungan dengan suatu negara. Dalam level ini, negara menggunakan organisasi internasional sebagai instrumen politik luar negeri. Selain itu, organisasi internasional berfungsi untuk memberikan informasi suatu negara ke negara lain. Dalam bukunya, Mingst menuliskan bahwa organisasi internasional juga dapat menentukan kelakuan suatu negara. Hal ini berfungsi untuk mencegah negara-negara dalam sistem pengambilan atau memberikan suatu kebijakan baik atau buruk terhadap negara lain, seperti hukuman untuk suatu negara melalui suatu kebijakan yang dibuat.

Ketiga, tingkatan organisasi internasional sehubungan dengan dengan individu. Organisasi internasional menjadi sarana untuk masyarakat dunia bersosialisasi. Hal ini sangat baik bagi individu karena dapat mempelajari budaya serta norma-norma internasional. Organisasi internasional juga menjadi tempat untuk mempelajari toleransi yang baik karena keanggotaan yang berasal dari berbagai negara yang ada di dunia.

Selain konsep organisasi internasional, dalam tulisan ini penulis juga menggunakan teori neorealisme. Neorealisme merupakan perspektif yang muncul dalam studi hubungan internasional. Teori ini berasumsi bahwa tatanan kehidupan manusia terdiri atas struktur yang saling bekerja sama. Dalam perkembangannya, negara juga seharusnya dilihat dari segala aspek struktural. Teori ini juga

menggambarkan sistem politik internasional dengan struktur dan unit yang saling berhubungan, neorealisme mewujudkan otonomi politik internasional (Waltz, 1979). Teori neorealisme yang dikemukakan oleh Waltz berpendapat bahwa dasar hubungan internasional adalah struktur yang anarki yang terdesentralisasi di antara negara-negara. Dalam bukunya, Waltz juga menjelaskan bahwa unit atau negara dari sistem internasional yang anarki ini dibedakan atas besar dan kecil serta kapabilitas negara tersebut.

Selain memiliki peran yang besar untuk sebuah negara, organisasi internasional juga memiliki berbagai fungsi yang nantinya mendukung peranan mereka dalam mencapai tujuan. Dalam bukunya, Archer menuliskan terdapat sembilan fungsi utama yang terdapat dalam suatu organisasi internasional. Kesembilan fungsi tersebut adalah:

- a* Artikulasi dan agregasi, Dalam fungsi ini nantinya organisasi internasional akan menjalankan berbagai mekanisme dalam sumber daya dan hasil ini akan didapatkan melalui perundingan anatar setiap anggota.
- b* Norma, Organisasi internasional terdiri dari norma-norma yang nantinya akan memperluas pengaruhnya.
- c* Pengerahan, Organisasi internasional memiliki fungsi yang penting dalam merekrut setiap partisipan dalam dunia internasional.
- d* Sosialisasi, Organisasi internasional berfungsi untuk memperluas pengaruh mereka dalam upaya pencapaian tujuan. Sosialisasi digunakan agar mendapatkan penerimaan dari sistem internasional itu sendiri.

- e Pembuatan peraturan, Pembuatan keputusan untuk mencapai tujuannya.  
Fungsi ini menjadi penting karena diperlukannya keputusan yang tepat dan dapat dimanfaatkan oleh negara-negara anggota lainnya. Pembuatan keputusan ini berdasarkan praktik yang dilakukan langsung oleh negara anggota.
- f Pengaplikasian peraturan, dalam organisasi internasional penerapan keputusan sering kali diserahkan kepada negara. Hal ini terjadi atas dasar keaulatan yang dimiliki oleh setiap negara yang merdeka.
- g Penyelesaian peraturan, Setiap aturan atau kebijakan yang dikeluarkan, organisasi internasional bertugas untuk mengesahkan aturan atau kebijakan tersebut akan dilakukan pengesahan oleh fungsi kehakiman.
- h Informasi, Untuk mencapai tujuannya setiap negara yang tergabung kedalam sebuah organisasi akan saling bertukar informasi. Hal ini penting agar tujuan dari organisasi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
- i Operasi, Organisasi internasional melakukan pelaksanaan tugasnya melalui pelayanan untuk negara anggota. hal ini mencakup keamanan pertahanan, kesejahteraan, kesehatan serta pelayanan teknis.

Dari klasifikasi dari fungsi organisasi internasional yang dituliskan oleh Archer ini, *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* menjalankan fungsinya sebagai artikulasi dan agregasi, sosialisasi, informasi. Sejalan dengan tujuan dari *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition*, beberapa klasifikasi ini akan penulis analisis melalui berbagai kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* pada tahun 2017 hingga 2019.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan secara ilmiah dalam rangka mengkaji suatu hal. Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu prosedur yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir (basuki, 2006). Penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Definisi dari metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis (Basuki, 2006).

Data dalam penelitian kualitatif merupakan faktor penting. Hal ini merupakan suatu penentu dari keberhasilan penelitian. Data-data dalam metode kualitatif bersumber dari kata-kata dan tindakan. Kemudian hal-hal berbentuk dokumen merupakan data pendukung lainnya (Maleong, 2005). Data yang penulis temukan nantinya akan dijadikan dasar dalam penulisan tulisan ini. Dengan tulisan ini penulis dapat menganalisis terkait peran serta aktivitas yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan oleh *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition*. Metode ini nantinya akan membantu penulis dalam menganalisis dan menjelaskan secara lebih mendalam.

### **1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini subjek yang ditentukan adalah *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition*. Selanjutnya penulis menentukan objek dalam penelitian ini adalah negara Afghanistan. Afghanistan merupakan negara yang

tergabung di dalam koalisi negara islam serta menjadi negara yang bergabung lebih awal dari negara lainnya

### **1.8.3 Metode Pengumpulan Data**

Terdapat dua cara pengumpulan data dalam metode kualitatif, yaitu pengumpulan data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer yang merupakan pengumpulan data yang berasal dari data yang telah digunakan oleh peneliti lain atau data dari sumber lain. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan umum dari pertanyaan penelitian yang telah diajukan (Bakry, 2016).

Pengumpulan dan pencarian data juga dilakukan melalui internet atau *website*. Hal ini dilakukan untuk melengkapi data-data yang nantinya sudah didapatkan dan menjadikan data internet sebagai data pendukung penelitian. Penelitian ini juga menggunakan teknik studi kepustakaan dalam pengumpulan data yang berasal dari buku, jurnal, artikel dan surat kabar.

### **1.8.4 Proses Pengumpulan Data**

Dalam proses penelitian, analisa yang harus dilakukan yaitu pengabsahan data dan pengambilan kesimpulan dari data tersebut. Hal ini dilakukan agar data sekunder yang sudah didapatkan dapat digunakan dalam penelitian ini. Pemeriksaan ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber, metode dan teori pemeriksaan (Moleong, 2005)



## BAB II

### SEJARAH KELOMPOK TALIBAN DAN *ISLAMIC MILITARY COUNTER-TERRORISM COALITION* DAN POSISI KEDUANYA DALAM DUNIA INTERNASIONAL

#### 2.1 Kelompok Taliban

##### 2.1.1 Awal kemunculan Taliban

Pada masa pemerintahan Presiden Burhanuddin Rabbani, maraknya kejahatan yang terjadi di negara berpengaruh terhadap kestabilan sosial politik. Mullah Muhammad Omar merupakan salah seorang yang ingin menjadikan negara Afghanistan menegakkan ideologi Islam di negara tersebut. Mullah Omar bersama para pelajar madrasah dari provinsi Kandahar Utara bersama-sama melawan kejahatan yang ada di Afghanistan. Islam dan jihad merupakan suatu hal yang wajar bagi pelajar madrasah tersebut. Mereka percaya bahwa jihad merupakan upaya untuk mempertahankan keyakinan dan kehormatan dari agama mereka (Edward, 2002). Mullah Muhammad Omar kecewa dengan pemerintah karena hukum Islam tidak kunjung diterapkan di Afghanistan. Setelah kekuasaan komunis runtuh di Afghanistan, banyak pejabat korup yang kemudian mempengaruhi kestabilan negara.

Hingga pada tahun 1994 Mullah Muhammad Omar bersama pelajar madrasah mendirikan gerakan yang diberi nama Taliban. Munculnya kelompok ini

sebagai reaksi kegagalan pemerintah dalam membentuk pemerintahan yang damai di Afghanistan (Edward, 2002). Para simpatisan Taliban merupakan orang-orang yang berasal dari madrasah yang ada di Afghanistan selatan. Madrasah ini dikenal menganut aliran Deobandi, sebuah aliran yang berasal dari madrasah di India utara yang berdiri sejak tahun 1866. Aliran ini merupakan aliran yang mengajarkan agama Islam secara ortodoks. Taliban diketahui memiliki pandangan bahwa dosa dan kemungkaran berasal dari tidak terlaksananya aqidah agama secara benar. Karena itu, kelompok ini merasa sanggup untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di negara Afghanistan dari sisi sosial dan politik. Taliban sebagai kelompok dianggap sebagai kelompok fundamentalis Islam. Melalui visi politik, Taliban sangat menolak untuk memisahkan antara konsep negara dan konsep agama. Bagi masyarakat Afghanistan, madrasah merupakan tempat untuk memenuhi kebutuhan religi mereka. Madrasah telah menjadi identitas tersendiri bagi masyarakat Afghanistan. Sebagai tempat yang populer di masyarakat Afghanistan, madrasah kemudian mulai memberika motivasi-motivasi sosial untuk para pelajarnya.

Taliban melakukan serangan di Kandahar pada tahun 1994 dan berhasil menguasai kota tersebut. Pada awal tahun 1995 taliban berhasil menguasai 12 provinsi di Afghanistan. Taliban mulai dikenal dapat memberantas korupsi serta dapat menurunkan angka kriminalitas di kota-kota negara Afghanistan (Goodson, 2001). Kelompok ini mampu mengendalikan kota-kota dalam jangka waktu yang singkat. Setelah dapat menguasai belasan kota, Taliban kemudian mengubah visi politik mereka untuk menerapkan hukum islam di Afghanistan. Tidak mudah bagi Taliban untuk menjalankan visi politik tersebut karena mereka harus melawan

kekuatan politik presiden Afghanistan saat itu. Kelompok ini harus mendapatkan kekuasaan di kota Kabul karena kota ini merupakan kota yang strategis secara politik. Pada akhir tahun 1996, Taliban berhasil menguasai kota Kabul dengan mengepung dua sisi kota tersebut. Hal ini menjadikan kekuasaan Presiden Rabbani mundur ke wilayah utara kota Bagram. Mullah Muhammad Omar sebagai pemimpin gerakan Taliban kemudian diangkat sebagai pemimpin Afghanistan di bawah rezim Taliban. Hal ini dikenal sebagai aksi kudeta kelompok Taliban terhadap pemerintahan Presiden Rabbani pada tahun 1996.

### **2.1.2 Pemerintahan Taliban**

Setelah berhasil merebut pemerintahan, pada tahun 1996 Taliban membentuk satu pemerintahan yang diberi nama Imarah Islam Afghanistan yang dipimpin oleh Mullah Muhammad Omar. Kekuatan Taliban di pemerintahan tidak hanya diisi oleh orang-orang yang berasal dari Kandahar namun juga diisi oleh basis Taliban di kota Jalalabad dengan pimpinan Akhund Rabbani (Rashid, 2000). Kedua poros ini kemudian mendirikan pemerintahan yang kuat di Afghanistan. Sebagai pemerintahan, Taliban mengambil keputusan yang berasal dari dewan suku Pashtun. Keputusan ini berdasarkan model Islam awal pada masa Nabi Muhammad. Juru bicara Taliban mengatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah berasal dari *Amirul Mu'minin* atau Mullah Muhammad Omar sebagai pemimpin negara Afghanistan. Pejabat pemerintahan percaya bahwa keputusan yang dibuat oleh pemimpin mereka sepenuhnya benar dan untuk mensejahterakan rakyat Afghanistan. Mullah Omar kemudian menjadi otoritas tertinggi di Afghanistan untuk sementara (Guelke, 2006).

Pejabat pemerintahan yang dipilih merupakan orang-orang yang berasal dari madrasah di Afghanistan. Bahkan, beberapa pejabat Menteri kabinet merupakan orang-orang yang berjuang untuk merebut kota Kabul dari kekuasaan Presiden Burhanuddin Rabbani. Semua pejabat pemerintahan merupakan orang-orang Pashtun. Tidak semua pejabat memenuhi kriteria untuk menduduki jabatan tersebut. hal ini terjadi karena balasan Mullah Omar terhadap loyalis yang sudah berjuang bersama Taliban (Adamec, 2010).

### **2.1.3 Posisi Taliban dalam dunia Internasional**

Setelah peristiwa terror yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2001, pemerintahan Amerika Serikat yang di pimpin oleh Bush segera memberi pengumuman ke public Amerika Serikat bahwa penyerangan tersebut dilakukan oleh kelompok teroris Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden. Amerika Serikat mendapatkan informasi bahwa pimpinan kelompok tersebut berada di negara Afghanistan yang dipimpin oleh rezim Taliban. Afghanistan saat itu menolak untuk bekerjasama dalam mencari Osama bin Laden karena pemerintahan Afghanistan berpendapat bahwa mereka tidak ada campur tangan dengan kelompok Al-Qaeda tersebut (Tristam, 2018).

Operasi Amerika Serikat dalam melawan kelompok terror ini kemudian membawa mereka ke negara Afghanistan dengan tujuan untuk menemukan pimpinan Al-Qaeda yang disembunyikan rezim Taliban. Serangan Amerika Serikat pada 7 Oktober 2001 berhasil berhasil memukul mundur rezim Taliban yang saat

itu berkuasa di pemerintahan. Amerika Serikat dibantu oleh kelompok oposisi Taliban yang berada di utara Afghanistan. Akibatnya, timbul ribuan orang korban sipil akibat serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut. Pemerintahan Amerika Serikat sangat bersungguh-sungguh dalam menggulingkan rezim Taliban saat itu. Sistem demokrasi dan liberal kemudian masuk ke dalam pemerintahan Afghanistan yang baru. Operasi militer Amerika Serikat dan sekutu ini menimbulkan dampak yang sangat besar kepada penduduk Afghanistan. Banyak dari mereka yang mengungsi ke wilayah Selatan dan Barat Daya Afghanistan untuk mencari kedamaian yang baru. Namun, akibat dari kamp pengungsian yang sangat jauh dari layak membuat ratusan orang meninggal dunia (Akhtar, 2008).

Bantuan juga dilakukan oleh Pakistan. Bantuan dan kerjasama sangat sering dilakukan oleh Afghanistan dan Pakistan (Akhtar, 2008). Jarak yang dekat menjadikan kerjasama sangat mungkin dilakukan. Bahkan, Pakistan pernah membantu Afghanistan dalam intervensi yang dilakukan oleh Uni Soviet terhadap negara Afghanistan. Sebagai negara tetangga yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Afghanistan dari komunisme, Pakistan sering di hadapkan kepada posisi yang sulit. Setelah peristiwa 9/11 terjadi, Pakistan yang dikenal mendukung Afghanistan diberikan opsi untuk bersikap dalam kebijakan Amerika Serikat untuk melawan kelompok terror di dunia. Pertama, Pakistan diberikan pilihan untuk tetap mendukung kelompok Taliban serta ikut berjuang dengan kelompok ini dan akan sangat berpengaruh kepada national interest mereka kedepannya. Kedua, Pakistan bergabung dengan koalisi internasional untuk memerangi kelompok terorisme yang ada di dunia. Dalam upaya untuk menjaga national security interest, Pakistan

kemudian ikut mendukung koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk melawan kelompok teroris di dunia (Akhtar, 2008).

## ***2.2 Islamic Military Counter-Terrorism Coalition***

### ***2.2.1 Islamic Military Counter-Terrorism Coalition***

Pada 15 Desember 2015, Arab Saudi mengumumkan pembentukan koalisi Islam untuk memerangi kelompok ekstremis di dunia. Menteri pertahanan Arab Saudi Mohammad bin Salman mengatakan bahwa pembentukan koalisi ini merupakan salah satu upaya negara Islam untuk membasmi penyakit yang disebabkan oleh kelompok ekstremis Islam. Koalisi ini berupaya untuk menghilangkan serta mengusir ancaman teror yang selama ini berkembang di Kawasan Timur Tengah dan negara-negara Islam lain di dunia (Occhiuto, 2018). Pembentukan koalisi ini juga memperlihatkan keseriusan Arab Saudi dalam bidang keamanan. Pada awal kemunculannya, koalisi ini tidak terlalu diperhatikan oleh negara barat karena beberapa koalisi yang dibentuk oleh Arab Saudi tidak berjalan dengan baik. Bergabungnya Mesir dan Pakistan menjadikan posisi koalisi ini lebih baik. Arab Saudi, Mesir dan Pakistan merupakan negara yang sangat dominan dalam dunia Islam. *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* merupakan gagasan dari pangeran kerajaan Mohammed bin Salman. Setelah dibentuk koalisi ini, Mohammed bin Salman melaksanakan latihan militer terbesar yang terdiri dari 300.000 tentara (Arab News, 2017).

Pada awal pembentukannya, koalisi ini bernama *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism* (IMAFT) yang terdiri dari 34 negara muslim. Terdapat beberapa

negara yang tidak secara langsung bergabung menjadi anggota koalisi ini. Indonesia, Azerbaijan dan Tajikistan merupakan negara yang tidak bergabung namun negara-negara tersebut memberikan dukungannya terhadap inisiatif Arab Saudi dalam membentuk koalisi Islam. Koalisi Islam ini terbentuk atas kesepakatan antara Arab Saudi dan beberapa negara Islam dalam memberantas terorisme melalui militer. Sejak pembentukannya, banyak pihak yang masih belum mengetahui tujuan dari koalisi militer bentukan Arab Saudi ini. Pihak Arab Saudi menjelaskan bahwa inisiatif pembentukan ini termasuk rencana untuk mengirim pasukan militer ke negara-negara Islam yang sedang memiliki konflik. Pengiriman pasukan akan dilakukan sesuai permintaan dan kesediaan negara-negara anggota untuk mengirimkan pasukannya ke negara yang sedang berkonflik. Koalisi ini juga akan memiliki markas yang bertempat di Riyadh untuk menjalankan koordinasi dan dukungan bagi setiap negara anggota. Dalam pertemuan Menteri Pertahanan negara-negara anggota di Riyadh pada tahun 2017, Pangeran Mohammed yang merupakan Menteri Pertahanan Arab Saudi memberikan penjelasan bahwa koalisi ini nantinya akan menjalankan tugas untuk memberikan bantuan militer, keuangan, intelijen serta bantuan politik untuk membantu setiap negara anggota dalam memberantas kelompok ekstremis.

Selain sebagai koalisi militer, *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* menggunakan cara apapun dalam menanggulangi terorisme. Koalisi ini secara langsung menargetkan kelompok ekstremis yang nantinya akan menjadi musuh dari koalisi ini serta akan menjadikan target operasi bagi setiap negara yang mendukung kelompok ekstremis. Dibentuknya koalisi Islam bukan hanya untuk

mengatasi masalah keamanan sementara, namun koalisi ini akan menjalankan misi keamanan secara luas dengan jangka waktu yang Panjang. Dalam upaya untuk menjalankan fungsi koalisi untuk menjaga keamanan, *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* akan menggunakan kekuatan militer kolektif yang berasal dari negara-negara anggota (Al-Ghafli, *The Islamic Military Alliance to Fight Terrorism: Structure, Mission and Politics*, 2017).

*Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* tidak hanya melawan aksi teror melalui aksi militer, koalisi ini juga melawan aksi terorisme dari ideologi yang digunakan oleh kelompok ekstremis. Dibentuknya koalisi ini dapat memperlihatkan bahwa koalisi “*Muslim-Centric*” yang dibentuk oleh Arab Saudi dapat mengakhiri konflik yang sebagian besar terdapat di negara-negara Islam. Koalisi ini memulai untuk mengambil alih Islam kembali dari aktor *non-state*, aktor radikal dan akan memberikan kememangan besar untuk negara-negara yang berkonflik. Salah satu arahan yang diberikan oleh Arab Saudi terhadap koalisi ini adalah kepercayaan terhadap agama Islam yang luntur akibat dari kelompok ekstremis yang ada saat ini (Islamic Military Counter-Terrorism Coalition, 2016).

Dalam membentuk koalisi islam, Arab Saudi dibantu oleh negara yang memiliki kekuatan militer besar dalam Kawasan Timur Tengah. Mesir memiliki kekuatan 1.329.250 tentara sedangkan Pakistan memiliki 919.000 tentara dan Arab Saudi memiliki 256.000 tentara militer. Dalam data *Global Fire power* tahun 2015, tercatat bahwa Mesir berada dalam urutan 9. Selanjutnya Pakistan berada di urutan nomor 15 dan Arab Saudi berada di urutan 17 (Global Fire Power, 2015). Arab



Saudi berkomitmen untuk melawan segala bentuk aksi terorisme yang ada di dalam negeri atau luar negeri. Komitmen Arab Saudi ini kemudian berakhir kepada pembentukan *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition*. Dalam website resmi *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition*, tercatat 41 negara Islam dari berbagai belahan dunia sudah bergabung dalam koalisi ini.

Untuk mencapai tujuannya, *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* menggunakan empat domain utama. Domain ini yang nantinya akan digunakan sebagai landasan koalisi dalam menjalankan operasinya. Untuk mempertahankan kehidupan yang baik di masa depan, *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* berusaha mempertahankan Ideologi Islam yang mengajarkan toleransi. Koalisi ini tidak hanya mempertahankan namun menegaskan kembali prinsip-prinsip Islam bahwa Islam merupakan negara yang mengutamakan perdamaian dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Koalisi ini juga memperkuat persepsi negara anggota agar bersatu untuk dapat melawan ideologi kelompok ekstremis dan terorisme. Menyerang terorisme melalui ideologinya dianggap penting karena kelompok ekstremis dan teroris memiliki pemahaman yang salah terhadap agama Islam. Selain Ideologi, *Islamic Military Counter-terrorism Coalition* menggunakan jalur komunikasi. Koalisi ini berusaha untuk selalu menyebarluaskan konten faktual dan ilmiah. Penyebaran paham ekstremis dianggap sangat mudah melalui media digital sehingga diperlukannya jalur komunikasi untuk menekan penyebaran hal tersebut. Koalisi ini menyebarkan informasi melalui *website* dan *media social* resmi. Melawan propaganda dengan memberikan pembelajaran dalam media center rutin dilakukan oleh koalisi ini. Tulisan-tulisan yang berkaitan dengan aksi terorisme

juga di unggah di *website* resmi sehingga mempermudah masyarakat untuk mendapatkan edukasi dini tentang penanggulangan aksi terorisme. Selain itu, koalisi Islam berkoordinasi dengan negara anggota dalam *Counter Terrorist Financing*. Negara anggota berkomitmen untuk tidak mendanai kelompok ekstremis dalam bentuk apapun. Negara anggota juga dituntut untuk menutup segala sumber pendanaan kelompok ekstremis agar menekan aksi-aksi teror yang akan dilakukan. Domain militer juga digunakan oleh koalisi ini. *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* berusaha untuk selalu memfasilitasi pengadaan serta perencanaan operasi militer. Domain militer menjadi penting untuk menjaga keamanan dan perdamaian negara anggota. Setiap negara akan memberikan informasi intelijen penting dalam upaya memberantas terorisme (Islamic Military Counter-Terrorism Coalition, 2016).

Negara-negara yang bergabung kedalam *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* tidak hanya negara yang stabil dalam militer namun juga terdapat negara yang hingga saat ini memiliki gejolak atas aksi teror di negaranya. Negara di Kawasan Asia dan Afrika juga turut berpartisipasi dalam koalisi ini. Libya, Yaman dan Afghanistan merupakan negara yang bergabung ketika keadaan negara sedang tidak stabil. Negara Afrika seperti Mali, Chad, Nigeria dan Somalia yang sedang menerima serangan teror dari militan setempat juga bergabung kedalam koalisi Islam ini. Negara Teluk seperti UEA, Bahrain, Qatar dan Kuwait tercatat ikut bergabung. Malaysia yang merupakan negara Kawasan Asia Tenggara ikut bergabung dalam koalisi ini dan diharapkan untuk dapat menyebarkan pengaruhnya dalam menanggulangi terorisme di Kawasan Asia Tenggara.

Selain negara-negara diatas, terdapat beberapa negara lain yang bergabung kedalam koalisi ini, yaitu: Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Brunei Darussalam, Chad, Comoros, Pantai Gading, Djibouti, Gabone, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Yordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Maldiva, Mali, Mauritania, Maroko, Malaysia, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Sierra Leone, Senegal, Sudan, Tongo, Tunisia, Turkey, Uganda dan Yaman. Dalam upaya untuk memberantas terorisme, Arab Saudi melalui Menteri pertahanan memfokuskan untuk menjaga Islam dan mengkoordinasikan setiap negara muslim yang bergabung untuk melawan terorisme. Mayoritas negara yang bergabung merupakan negara muslim Sunni. Negara Timur Tengah yang memiliki populasi Islam tinggi seperti Iran, Iraq dan Syria tidak bergabung kedalam koalisi Islam ini. Hal ini kemudian menjadikan masyarakat dunia memiliki anggapan bahwa koalisi yang dibentuk oleh Arab Saudi ini merupakan koalisi Sunni (Al-Ghafli, The Islamic Military Alliance to Fight Terrorism: Structure, Mission and Politics, 2017).

*Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* memiliki prinsip-prinsip untuk mendukung jalannya setiap operasi yang dijalankan setiap negara anggota. Pertama, prinsip legitimasi untuk memberikan pengakuan legitimasi pan-Islam agar terciptanya rasa hormat dan dukungan dari komunitas internasional. Kedua, Lokalisasi agar dapat menciptakan solusi yang sesuai dengan kebudayaan lokal untuk melawan terorisme. Ketiga, prinsip sumber daya untuk memfasilitasi kontribusi negara anggota dalam pendanaan berdasarkan kemampuan setiap negara. Keempat, kelincahan untuk beroperasi dengan efisien dan dapat

memutuskan sesuatu dengan tepat. Kelima, prinsip kemitraan untuk meningkatkan kerjasama dengan organisasi eksternal. Keenam, prinsip kolaborasi agar setiap negara dapat melakukan kerja sama dengan setiap negara anggota dengan baik serta dapat melakukan kerja sama dengan negara-negara pendukung dan organisasi internasional dalam bidang penanggulangan terorisme. Ketujuh, prinsip partisipasi untuk melibatkan negara-negara anggota dalam perencanaan koalisi. Kedelapan, prinsip tujuan bersama untuk menyelaraskan tujuan strategis yang dimiliki oleh koalisi. Terakhir, prinsip kedaulatan untuk penekanan terhadap kedaulatan negara-negara anggota dan independensi hukum serta peraturan yang ada di negara anggota.

Dibentuknya koalisi ini juga berdasarkan tujuan strategis. Arab Saudi dan negara anggota lain ingin memperkuat kontribusi negara-negara Islam terhadap keamanan serta perdamaian dunia. Maraknya aksi teror ini menjadikan negara-negara Islam bersatu untuk melawan aksi tersebut. Pelatihan militer *Northern Thunder* yang di bentuk oleh Arab Saudi memperlihatkan keseriusan negara Islam dalam menaggulangi aksi terorisme di dunia. Koalisi ini juga dapat memperkuat solidaritas dan kolaborasi. Hal ini dilakukan untuk mengubah citra agama Islam sebagai agama yang menghasilkan kelompok ekstremis di dunia. Islamophobia yang muncul merupakan salah satu fenomena yang harus di hapus oleh negara-negara Islam. *Islamic Military Counter Terrorism Coalition* juga akan mengubah persepsi ideologi radikal yang berkembang di beberapa negara anggota melalui kampanye komunikasi strategis. Kampanye ini berupa bantahan terhadap narasi serta propaganda radikal dan ekstremis. Negara anggota akan kembali menegaskan nilai-

nilai Islam moderat, prinsip perdamaian, toleransi dan kasih sayang. Islam merupakan negara yang selalu mengedepankan perdamaian. Namun dengan munculnya kelompok ekstremis nilai-nilai Islam dianggap jauh dari kata damai. Selain itu, dalam tujuan strategisnya koalisi ini juga memerangi pendanaan terorisme yang bekerjasama dengan *Counter Terrorism Financing (CFT)*.

Pada pertemuan Menteri Pertahanan seluruh anggota aliansi di Riyadh pangeran kerajaan Arab Saudi menjelaskan bahwapentingnya menjalin kerja sama antara negara koalisi untuk memulai usaha-usaha yang akan dijalankan setelahnya. Pertemuan tersebut juga membahas fokus *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* pada aksi terror yang ada di Afghanistan, Iraq, Syria, Libya dan Mesir dimana Al-Qaeda dan kelompok Taliban terlibat atas pembunuhan ribuan penduduk sipil dan pasukan keamanan negara tersebut. *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* juga membangun kerjasama dengan negara-negara yang memiliki pengaruh besar di dunia. Tidak hanya melibatkan negara berpengaruh, *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* juga akan melibatkan peran dari organisasi internasional yang bersentuhan langsung dengan aksi teror di dunia. Oman yang sebelumnya dianggap netral dalam hal penanggulangan aksi terorisme juga akhirnya bergabung dengan koalisi ini untuk memperlihatkan rasa solidaritas antar negara Islam (The New Arab, 2017).

### **2.2.2 *Islamic Military Counter-Terrorism* dan Afghanistan**

Afghanistan saat ini dikenal sebagai negara dengan tingkat kekerasan terorisme tertinggi di dunia (Institute for Economics & Peace, 2019). Bergabungnya

Afghanistan dalam koalisi Islam merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan bantuan dari negara-negara Muslim yang memiliki visi untuk melawan kelompok ekstremis di negara Afghanistan. Afghanistan tercatat sebagai negara yang terakhir yang bergabung ke dalam koalisi bersamaan dengan bergabungnya Oman. Afghanistan dalam *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* memiliki ekspektasi yang sangat besar. Dengan berkumpulnya negara-negara Muslim di dunia untuk melawan aksi kelompok ekstremis membawa angin segar untuk negara-negara di dunia khususnya negara Afghanistan (Islamic Military Counter-Terrorism Coalition, 2017).

Afghanistan sebagai negara yang menjadi target kelompok ekstremis ini kemudian menyampaikan komitmen mereka terhadap koalisi Islam ini dalam pertemuan para Menteri Pertahanan di Riyadh. Setidaknya lebih dari 24 anggota militer Afghanistan gugur dalam pertempuran melawan kelompok terorisme di Afghanistan. Terdapat 20 kelompok ekstremis di selatan Kawasan Ishira dan sebagian anggotanya merupakan orang-orang luar Afghanistan. Orang-orang asing yang bergabung ke dalam kelompok ekstremis ini bergabung untuk menegakkan misi Taliban. Taliban sebagai kelompok ekstremis besar menyediakan akses untuk keluar dan masuk ke negara Afghanistan serta menyediakan tempat-tempat aman yang kemudian menjadi markas untuk menjalankan aksinya.

Dalam menjalankan aksinya, Taliban memiliki beberapa sumber pendapatan. Hal ini dijelaskan oleh delegasi pemerintahan Afghanistan dalam pertemuannya dengan seluruh anggota koalisi di Riyadh. Taliban mendapatkan

dana dari perdagangan narkoba, penculikan masyarakat, penyiksaan dan penambangan ilegal. Penjualan narkoba yang dilakukan oleh Taliban menjadi fokus utama pemerintahan Afghanistan karena pemasukan yang di dapat kelompok Taliban sangat besar dari narkoba. Pemerintahan Afghanistan berhasil menghentikan pemasukan dana kelompok Taliban jalur perdagangan narkoba di Provinsi Helmand.

Dalam rangka menjalin hubungan diplomatik yang baik, delegasi *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* yang dipimpin oleh Jendral Abdullah Al-Shaleh berkunjung ke negara Afghanistan. Kunjungan ini dilakukan pada bulan oktober tahun 2018. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani kemudian menjelaskan posisi pemerintahan Afghanistan terkait dengan aksi teror yang terus terjadi di negaranya. Kunjungan ini merupakan program *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* dalam rangka mengeratkan kerja sama yang akan di jalankan oleh kedua pihak. Jendral Abdullah Al-Shaleh menyampaikan dukungan penuh *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* terhadap Afghanistan dalam Upaya memberantas aksi terorisme melalui jalur diplomatik dan militer. Kunjungan *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* di Afghanistan berlanjut ke kementerian Pertahanan Afghanistan. Jendral Tariq Shah Bahrami selaku Menteri menerima kunjungan *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* yang menghasilkan kerjasama untuk mempermudah penanggulangan aksi terorisme di negara Afghanistan (*Islamic Military Counter Terrorism Coalition*, 2018). Pada tanggal 25 Juni 2019, Afghanistan bersama dengan beberapa negara anggota koalisi Islam mengirimkan delegasinya untuk melakukan kerjasama yang intensif

berkaitan dengan aktivitas yang akan dilakukan oleh koalisi (Islamic Military Counter-Terrorism Coalition, 2019).

Upaya pemerintahan Afghanistan melalui upaya diplomatik, ekonomi dan militer akan terus dilakukan demi mewujudkan Afghanistan yang damai. Pemerintah Afghanistan ingin melakukan negosiasi yang nantinya dapat melindungi masyarakat dari serangan teror yang terus dilakukan oleh kelompok Taliban. Demi memberikan rasa aman terhadap masyarakat, pemerintah Afghanistan kemudian memberikan janji untuk menenyapkan seluruh kelompok teror di Afghanistan jika tidak bisa menjalankan negosiasi dengan baik. Afghanistan juga memberikan lima pemikiran mereka untuk menjadikan *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* dapat menjalankan fungsinya. Pertama, Afghanistan mengusulkan untuk melakukan kerjasama intelijen dalam melakukan setiap operasi dibawah payung *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition*. Kedua, menjadikan setiap ideologi kelompok teror sebagai target dalam melawan kelompok terorisme di dunia. Ketiga, menjadikan sumber keuangan kelompok teroris sebagai target operasi. Hal ini yang sudah dilakukan oleh Afghanistan dalam memberantas pengedaran narkoba dari kelompok Taliban. Keempat, membuat perencanaan dalam melawan aksi terorisme serta membangun consensus dunia Islam. Kelima, meminta *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* membantu petugas anti-teror Afghanistan untuk menjalankan aktivitas dalam upaya rekonsiliasi perdamaian bagi setiap anggota Taliban yang ingin meletakkan senjata dan bergabung kedalam kehidupan yang lebih damai di bawah pemerintahan Afghanistan (Islamic Military Counter-Terrorism Coalition, 2017).



Terhitung semenjak dibentuknya *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* hingga tahun 2019, Koalisi ini belum melakukan fungsi militer mereka seperti pengiriman pasukan ke Afghanistan. Kegiatan yang dilakukan kedua pihak hingga tahun 2019 hanya kunjungan hingga pengiriman delegasi untuk bekerja di markas *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* di Riyadh.



## BAB III

### PERAN *ISLAMIC MILITARY COUNTER-TERRORISM COALITION* TERHADAP AKSI TERORISME DI AFGHANISTAN TAHUN 2017-2019

Merujuk kepada konsep kerjasama internasional yang di tuliskan oleh T. May Rudi, dua kalisifikasi konsep kerjasama meliputi kerjasama pertahanan dan keamanan serta kerjasama fungsional. *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* merupakan suatu organisasi internasional yang bergerak dalam bidang kerjasama pertahanan dan keamanan negara anggotanya. Negara-negara Islam yang memiliki konflik kemudian dijadikan fokus peran mereka dalam menjalankan setiap tugasnya. Afghanistan merupakan salah satu negara yang menjadi tempat operasi dari koalisi ini untuk menjaga keamanan dan pertahanan pemerintahannya dari kelompok Taliban di Afghanistan

Dalam melihat peran dari *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition*, penulis menggunakan buku Karen Mingst sebagai acuan untuk mengetahui peranan koalisi islam ini.

#### 3.1 Analisis Konsep Peranan Karen Mingst

##### *Peran Intergovernmental Organizations*

Dalam konsep yang dikemukakan oleh Karen Mingst dalam buku yang berjudul *Essential of International Relations*, Mingst membagi tiga tingkatan analisis untuk melihat peran dari *Intergovernmental Organization*. Tiga tingkatan analisis tersebut yaitu:

Level	Peran
1. Dalam sistem internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkontribusi pada kebiasaan kerjasama (menjadi terbiasa untuk bekerjasama)</li> <li>- Terlibat dalam berbagi informasi dan pengawasan</li> <li>- Bantuan dalam penyelesaian sengketa</li> <li>- Mengadakan aktifitas operasional.</li> <li>- Berfungsi sebagai tempat negosiasi.</li> <li>- Mengarahkan pada penciptaan rezim internasional.</li> </ul>
2. Sehubungan dengan negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh negara sebagai instrument kebijakan luar negeri</li> <li>- Digunakan oleh negara untuk melegitimasi kebijakan luar negeri</li> <li>- Menambah sumber informasi untuk negara</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membatasi perilaku negara– mencegah negara untuk bertindak dalam memberikan sanksi</li> </ul>
3. Sehubungan dengan individu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat individu untuk dapat bersosialisasi dengan norma internasional</li> <li>- Tempat dimana individu mendapat Pendidikan terkait dengan kesamaan dan perbedaan</li> </ul>

Level analisis pertama yaitu dalam sistem internasional, *Intergovernmental organization* berkontribusi untuk membentuk kerjasama. *Intergovernmental organization* dalam level ini dapat dijadikan sebagai aktor utama dalam dunia internasional. Hal ini disebabkan oleh kebijakan dari *intergovernmental organization* ini yang berpengaruh untuk semua negara di dunia. Salah satu contohnya *World Health Organization* sebagai induk dari organisasi kesehatan. Setiap negara berkomitmen kepada *World Health Organization* untuk masalah kesehatan. Beberapa international organization dalam level ini juga meliputi ranah untuk bernegosiasi.

Level analisis kedua yaitu sehubungan dengan negara. Untuk negara, *intergovernmental organization* memperluas kemungkinan untuk membuat

kebijakan luar negeri dan memaksakan kebijakan tersebut agar dapat terlaksana. Beberapa negara yang masuk kedalam *intergovernmental organization* hanya memanfaatkannya sebagai instrument dalam kebijakan luar negeri. Negara berpendapat bahwa *intergovernmental organization* dapat melegitimasi kebijakan mereka agar menjadi kebijakan yang lebih kuat dari sebelumnya. Sebagai organisasi, *intergovernmental organization* juga memaksa negara untuk menentukan pilihan dalam setiap kebijakan yang akan di sepakati. Hal ini juga dipengaruhi oleh kesepakatan terhadap prinsip, norma dan peraturan yang sudah di sepakati pada awal pembentukannya. Setiap negara sejatinya harus menyesuaikan kebijakan mereka dengan tujuan serta fungsi organisasi internasional itu sendiri.

Level analisis ketiga yaitu sehubungan dengan individu. *Intergovernmental organization* juga membuka kesempatan dalam bidang kepemimpinan. Individu yang tergabung kedalam *intergovernmental organization* dapat bersosialisasi dan membentuk kerjasama dalam sistem internasional. Individu juga dapat mempelajari perbedaan yang ada dalam *intergovernmental organization*. Hal ini berguna dalam ranah Pendidikan bagi individu tersebut.

Dalam analisis Peranan *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition*, penulis memilih level analisis kedua, yaitu *With respect to states*.

### **3.1.1 Analisis level With Respect to States**

#### **Digunakan Oleh Negara Sebagai Instrument Kebijakan Luar Negeri**

Arab Saudi membentuk koalisi Islam untuk melawan kelompok terorisme yang muncul di wilayah timur tengah dan negara-negara Islam di dunia. Dengan inisiatif ini Saudi berhasil mendapatkan dukungan dari negara-negara Islam yang memiliki militer yang kuat. Mesir yang memiliki militer terkuat di kawasan Timur Tengah bergabung untuk mensukseskan tujuan dari koalisi Islam. sejalan dengan Mesir, Pakistan kemudian ikut bergabung. Pakistan merupakan salah satu negara Islam yang memiliki kelompok teror Taliban. Sebagai negara yang berdekatan dengan Afghanistan, Pakistan juga memiliki tujuan yang sama dengan Arab Saudi, yakni memerangi kelompok teror yang selalu meresahkan masyarakatnya. Taliban yang lahir dari kedua yang berdekatan ini juga termasuk ke dalam kelompok yang akan diperangi oleh *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition*.

Menteri pertahanan Arab Saudi Mohammad bin Salman memiliki visi baru untuk merubah pandangan masyarakat dunia terhadap agama islam. MBS ingin merubah wajah islam yang lebih moderat dan bersih dari kelompok ekstremis. Selama ini, islam terkena stigma bahwa kelompok teror merupakan produk dari ajaran-ajaran Islam. dengan Dibentuknya *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* dapan memberikan pandangan baru untuk dunia. Negara-negara Islam akan ikut serta untuk membantu koalisi dunia yang selama ini sudah memerangi kelompok teror yang tersebar di Kawasan negara Islam seluruh dunia. Bergabungnya Afghanistan kedalam koalisi ini merupakan salah satu keseriusan Presiden Asraf Ghani dalam penyelesaian konflik antar pemerintahan resmi Afghanistan dan kelompok terorisme Taliban.

Dalam kunjungan yang dilakukan oleh Islamic Military Counter-Terrorism Coalition pada tahun 2018 lalu, pemerintahan Afghanistan melalui Menteri Pertahanan melakukan kerja sama antara *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* dengan kementerian pertahanan Afghanistan berkaitan dengan upaya memberantas kelompok ekstremis Taliban di Afghanistan. Pertemuan dengan Afghanistan ini diperlukan karena pada awal pembentukan koalisi ini, Afghanistan merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan koalisi militer dalam menjalankan fungsinya.

### **Digunakan Oleh Negara Untuk Melegitimasi Kebijakan Luar Negeri**

Kebijakan luar negeri setiap negara berbeda satu dengan yang lainnya. Namun, dengan bergabungnya negara-negara Islam ke dalam *Islamic Military Counter-Terrorism* dapat dikatakan bahwa negara Islam menginginkan dunia yang damai sebagaimana ajaran agama Islam. Taliban yang merupakan kelompok teror yang memiliki basis di Afghanistan telah menjadi beban berat untuk pemerintahan Ashraf Ghani. Terciptanya koalisi Islam ini merupakan salah satu tujuan dari Mohammed bin Salman agar kelompok ekstremis seperti ISIS dan Taliban dapat dihapuskan dari dunia Islam. Keterlibatan negara barat juga menjadikan Arab Saudi memiliki keinginan untuk membantu negara Islam yang sedang mengalami konflik dalam negeri.

### **Menambah Sumber Informasi Untuk Negara**

Dalam menjalankan fungsinya, *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* mewajibkan seluruh anggota koalisi untuk berbagi informasi. Informasi

ini berkaitan dengan empat domain utama dari koalisi yaitu militer, komunikasi, keuangan kelompok terorisme dan ideologi. Dengan hadirnya *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* dalam dunia internasional, negara-negara dapat mengetahui secara jelas mengenai kebijakan luar negeri dari negara lain. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh negara yang kurang memiliki hubungan bilateral atau multilateral dalam membuat kebijakan. Adanya pertemuan serta kerja sama dalam suatu koalisi dapat meningkatkan partisipasi dari negara-negara kecil.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai koalisi Islam dalam memberantas aksi terorisme, *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* memiliki empat domain utama. Hal ini dibentuk agar visi dan misi dari koalisi ini dapat berjalan dengan baik. Salah satu domain utama itu adalah komunikasi. Bidang komunikasi menjadi penting dalam koalisi ini karena pergerakan kelompok ekstremis yang sangat cepat dan *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* sebagai koalisi Islam diharuskan untuk terus memperbarui setiap informasi yang berkaitan dengan kelompok ekstremis di dunia.

Setiap informasi yang ada dapat diakses oleh seluruh anggota koalisi. Informasi tersebut sangat berguna bagi negara anggota dan akan terus memperkuat bidang keamanan mereka dari serangan kelompok ekstremis. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dari *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* yaitu saling berbagi. Setiap anggota harus saling memberikan informasi terkait dengan perkembangan domestik negaranya atau pengetahuan negara tersebut terkait dengan aksi dan kelompok ekstremis.



Agar semua informasi yang ada dapat diterima oleh setiap negara anggota dengan baik, *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* menerima setiap perwakilan dari negara anggota untuk dapat bekerja di markas besar *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* yang berada di Riyadh, Arab Saudi. Afghanistan merupakan salah satu negara yang mengirimkan delegasinya untuk bekerjadi di markas *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* di Arab Saudi. Sebagai negara yang memiliki kelompok ekstremis aktif hingga saat ini, bantuan yang diberikan oleh *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* sangat berguna untuk pemerintahan Afghanistan.

### **Membatasi Perilaku Negara**

Dalam menjalankan fungsinya, *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* selalu melibatkan setiap negara anggota. Berdasarkan empat domain utama dari koalisi ini, seluruh domain selalu melibatkan negara anggota. Domain ini yang nantinya menjadi tugas dari koalisi ini dalam rangka memberantas terorisme di dunia. Pertama, *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* melawan kelompok ekstremis dari akarnya yaitu ideologi. Kedua, ikut berperan aktif dalam bidang komunikasi agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dunia terkait dengan perkembangan Islam dan kelompok teror yang tersebar di dunia. Ketiga, koalisi ini berusaha untuk menekan laju keuangan kelompok ekstremis yang di dapat dari penjualan narkoba dan senjata ilegal. Keempat, Melalui aksi militer.

Dengan bergabungnya negara-negara islam ke dalam koalisi ini, kekuatan yang dapat digunakan sudah pasti menjadi sangat besar. Sebagaimana koalisi militer, *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* memiliki komandan militer untuk melakukan koordinasi secara berkala agar kekuatan yang diluncurkan nantinya maksimal. Dengan adanya empat domain ini, setiap negara anggota koalisi harus memiliki tujuan yang sama dengan *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* agar tujuan yang sudah di bentuk dapat tercapai.

Sebagai koalisi, *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* memiliki sembilan prinsip dasar yang harus dihormati oleh setiap negara anggota. Prinsip-prinsip ini akan menjadi penting ketika koalisi akan menentukan suatu kebijakan untuk dijalankan oleh seluruh anggota koalisi. Namun, salah satu prinsip menekankan kepada prinsip kedaulatan. Prinsip kedaulatan ini mengharuskan setiap negara untuk menghormati kedaulatan dari negara-negara anggota atas regulasi hukum yang berlaku di negara tersebut. *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* sebagai koalisi akan menghormati setiap regulasi hukum yang berlaku di negara-negara anggota.

### **3.2 Analisis Fungsi Islamic Military Counter-Terrorism Coalition menurut konsep Clive Archer**

*Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* sebagai organisasi negara-negara Islam untuk memberantas aksi terorisme menjadi arena bagi negara anggota untuk mengungkapkan apa yang menjadi hambatan negara mereka dalam memberanta terorisme. Hal ini dilakukan melalui setiap pertemuan tahunan yang

dilakukan oleh pejabat keamanan dan pertahanan setiap negara Islam yang bergabung menjadi anggota dari *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition*.

Clive Archer berpendapat bahwa terdapat Sembilan fungsi dari organisasi internasional. Fungsi ini yang akan menunjang peranan setiap organisasi internasional di dunia dalam menjalankan tugasnya. Dari ke-sembilan klasifikasi tersebut, penulis memilih tiga klasifikasi fungsi yang menunjang peranan dari *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition*. Pertama yaitu *articulation and aggregation*. Kedua *socialization* dan ketiga *Information*.

### **3.2.1 Artikulasi dan Agregasi**

Organisasi internasional dapat berfungsi sebagai instrument bagi negara untuk mengartikan serta mengagregasikan kepentingannya. Organisasi internasional menjadi salah satu bentuk partisipasi aktif dalam sistem internasional yaitu sebagai forum berdiskusi, berargumentasi serta bersatu. Dalam isu terorisme, *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* menjadi salah satu jalan untuk negara Islam dalam upaya untuk memberantas terorisme serta untuk memperbaiki citra agama Islam yang selama ini dipandang buruk oleh negara lain.

### **3.2.2 Sosialisasi**

Organisasi internasional selalu berupaya untuk mentransfer nilai-nilai yang menjadi factor penting dalam mencapai tujuan bersama. Proses sosialisasi pada sistem internasional berlangsung pada tingkat internasional yaitu setiap negara yang menjadi anggota dan nantinya akan mempengaruhi setiap individu dan kelompok di dalam sistem internasional. Dengan fungsi ini, organisasi internasional

dapat secara langsung memberikan kontribusinya di negara-negara anggota. Setiap negara yang menjadi anggota dapat lebih berperan aktif dalam peningkatan nilai kerja sama.

### 3.2.3 Informasi

Fungsi informasi yang dilakukan oleh organisasi internasional adalah melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan dan penyebaran kepada setiap negara anggota. Hal ini dilakukan agar setiap negara mendapatkan manfaat dari bergabungnya mereka ke dalam suatu organisasi internasional. *Pembentukan Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* sebagai organisasi negara Islam untuk memberantas terorisme di dunia direspon baik oleh negara-negar Islam. beberapa negara yang bergabung ke dalam *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* merupakan negara Islam yang kecil sehingga bergabungnya mereka sangat berdampak baik kepada politik luar negeri.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Kelompok ekstremis Taliban yang melakukan operasi di Afghanistan menjadi satu masalah yang harus dihadapi oleh pemerintahan Afghanistan. Setelah runtuhnya rezim Taliban pada tahun 2001, kelompok ini kemudian menjadi kelompok yang terus menerus melakukan aksi terornya terhadap pemerintahan Afghanistan dan masyarakat di Afghanistan. Hal ini merupakan suatu tindak kejahatan terorisme yang dilakukan oleh kelompok ini. Pemerintahan Afghanistan yang dibantu oleh negara-negara dunia lainnya berusaha untuk memberantas kelompok Taliban. Inisiatif pemerintahan Arab Saudi pada tahun 2015 untuk membentuk suatu koalisi Islam yang bertujuan untuk memberantas terorisme mendapatkan banyak apresiasi dari negara-negara Islam di dunia.

Analisis yang menggunakan konsep kerjasama menunjukkan bahwa *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* merupakan salah satu organisasi yang eksis untuk menjaga unit-unit yang lemah. Hal ini dapat dilihat dari fungsi serta visi dan misi dari *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition*. Negara-negara yang secara langsung melakukan kerjasama berusaha untuk mencari kekuatan yang lebih kuat untuk bekerja sama dalam berbagai bidang dalam rangka memenuhi kepentingan nasional masing-masing. Afghanistan sebagai negara yang menjadi basis operasi kelompok Taliban tidak dapat mempertahankan negaranya tanpa bantuan yang diberikan oleh dunia internasional. Beberapa bantuan yang sudah diterima dari

negara seperti Amerika Serikat dan beberapa organisasi internasional seperti NATO dan PBB.

Konsep peranan yang dikemukakan oleh Mingst membuktikan bahwa *intergovernmental organization* digunakan oleh negara-negara yang menjadi anggota sebagai instrumen dalam politik luar negeri negara tersebut. Arab Saudi yang juga termasuk kedalam negara yang berpengaruh dalam pembentukan *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* menyebarkan pengaruhnya melalui *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition*. Negara yang tergabung juga menggunakan sebuah *intergovernmental organization* untuk melegitimasi kebijakan luar negeri mereka serta mendapatkan berbagai informasi negara yang tersedia dalam organisasi tersebut. Hadirnya *intergovernmental organization* juga menjadi hambatan bagi negara anggota dalam membuat kebijakan karena terdapat hal-hal yang sudah disepakati bersama dengan negara anggota lainnya. Dalam hal ini, *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* memiliki asas untuk menghormati kedaulatan suatu negara. Hal ini akan menjadi hambatan ketika koalisi ini akan menjalankan operasi militer di kawasan Afghanistan.

Berdasarkan penjelasan diatas, *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* masih belum melakukan aksi yang signifikan terhadap negara Afghanistan berkaitan dengan kelompok terorisme. Sebagai koalisi militer, *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* tidak dapat membantu Afghanistan dari sisi militer. Namun, *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* menjadi sebuah instrument untuk Afghanistan dalam membentuk kebijakan. *Islamic Military*

*Counter-Terrorism Coalition* juga menjadi sarana pencarian informasi kelompok ekstremis Taliban bagi Afghanistan yang turut aktif mengirimkan delegasinya ke markas besar *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition*.

#### **4.2 Saran dan Rekomendasi**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan yang telah ditulis diatas, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan informasi yang menghambat jalannya penelitian. Informasi yang terbatas menjadi masalah utama karena sebagai koalisi militer dapat dipastikan terdapat beberapa informasi yang tidak dapat dikonsumsi untuk masyarakat secara luas.

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, penulis memberikan saran dan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian terkait dengan upaya non-militer yang dilakukan oleh *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition* dalam menjalankan fungsinya. Sehingga dapat menjadi pembanding terhadap upaya yang sudah dilakukan koalisi ini di negara Afghanistan.

## Daftar Pustaka

- Strategic Vision*. (2016, December 15). Retrieved February 26, 2020, from [www.imctc.org](http://www.imctc.org): <https://imctc.org/English/About>
- VOA Indonesia*. (2018, Oktober 24). Retrieved Februari 26, 2020, from [voaindonesia.com](http://voaindonesia.com): <https://www.voaindonesia.com/a/koalisi-as-dan-6-negara-arab-umumkan-sanksi-terhadap-pendukung-taliban/4626379.html>
- Haqqani, J. A. (2019, Oktober 8). The Taliban still hasn't broken with al-Qaeda. p. 3.
- Institute for Economics & Peace. (2019). Measuring The Impact of Terrorism. *Global Terrorism Index 2019*, 8.
- Institute for Economics & Peace. (2019). Terrorism Incidents. *Global Terrorism Index 2019*, 10.
- Harmisch, S. (2013). Role Theory in International Relations. *Heidelberg: Institute of Political Science*, 3.
- harmisch, S. (2013). Role Theory in International Relations. *Heiderlberg: Institute of Political Science*, 20.
- Basuki, S. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- basuki, S. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Maleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung.
- Bakry, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakaya.
- Wanandi, J. (2002). A Global Coalition against International Terrorism. *International Security*, 184-189.
- Yamamoto, M. M. (2017). *Terrorism Against Democracy: Based in Part on Stansfield Turner's University of Maryland Course, "Terrorism & Democracy"*. Maryland: Center for International & Security Studies, U. Maryland.
- Büggermann, D. U. (2017). *The Asymmetric War of ISIL: Implications for Counter-Terrorism*. Germany: Federal Academy for Security Policy.
- Institute for Economics & Peace. (2019). Measuring The Impact of Terrorism. *Global Terrorism Index 2019*, 8.
- Harnisch, S. (2013). Role Theory in International Relations. *Heidelberg: Institute of Political Science*.
- Sebastian Harnisch, C. F. (2011). Role Theory in International Relations: Approaches and analyses. *Routledge Advances in International Relations and Global Politics*, 8.
- Deitelhoff, N. (2006). Überzeugung in der Politik. Grundzüge einer Diskurstheorie Internationalen Regierens. *Frankfurt am Main: Suhrkamp*, 66.
- Jenkins, B. M. (2016). *A Saudi-Led Military Alliance to Fight Terrorism: Welcome Muscle in the fight Against Terrorism, Desert, Mirage or Bad Idea?* New York: RAND Corporation.

- Islamic Military Counter-Terrorism Coalition. (2016, December 15). *Islamic Military Counter-Terrorism Coalition*. Retrieved February 26, 2020, from [www.imctc.org](https://www.imctc.org): <https://imctc.org/English/About>
- Islamic Military Counter-Terrorism Coalition. (2017). *Inaugural Meeting of the IMCTC Ministers of Defence Council (Islamic Republic of Afghanistan)*. Riyadh: Imctc.org.
- Archer, C. (2001). *International Organizations*. London and New York: Routledge.
- Margaret P. Karns, K. A. (2015). The Politics and Processes of Global Governance. *International Organizations*, 12-15.
- Wolfe, T. A. (1986). *Introduction to International Relations: Power & Justice (3rd Edition)*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Mingst, K. A. (2004). *Essentials of International Relations*. New York: W. W. Norton & Company, Inc.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Edward, D. B. (2002). *Before Taliban: Genealogies of the Afghan Jihad*. California: University of California Press.
- Goodson, L. (2001). *Afghanistan's Endless War*. London: University of Whashington Press.
- Rashid, A. (2000). *Taliban Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia*. London: Yale University Press .
- Guelke, A. (2006). *Terrorism and Global Disorder*. New York: Tauris Publisher.

Adamec, L. (2010). *The A to Z Afghan War, Revolutions and Insurgencies*. U.S.A:  
Scarecrow Press.

Tristram, P. (2018). *History of The Taliban: Who They Are, What They Want*.  
ThoughtCo.

Akhtar, N. (2008). Pakistan, Afghanistan and The Taliban. *International Journal  
on World Peace*.

Occhiuto, A. (2018). Islamic Military Counter Terrorism Coalition. *Euro-Gulf  
Information Center*.

Arab News. (2017). *Saudi crown prince vows not to allow extremists to tarnish  
"our beautiful religion"*. Arab Saudi: The Arab News.

The New Arab. (2017, November 19). *The New Arab news*. Retrieved from  
english.alaraby.co.uk:  
[https://english.alaraby.co.uk/english/news/2017/11/19/saudi-anti-terror-  
coalition-to-hold-first-meeting-in-riyadh](https://english.alaraby.co.uk/english/news/2017/11/19/saudi-anti-terror-coalition-to-hold-first-meeting-in-riyadh)

Global Fire Power. (2015). *Global FirePower Ranks*. Retrieved from  
globalfirepower.com: [https://www.globalfirepower.com/global-ranks-  
previous.asp](https://www.globalfirepower.com/global-ranks-previous.asp)

Islamic Military Counter-Terrorism Coalition. (2019, 7 29). *IMCTC-Media Center*.  
Retrieved from IMCTC-Media Center:  
<https://imctc.org/English/NewsroomDetail/Index/637023230365204790>

Islamic Military Counter Terrorism Coalition. (2018, 10). *IMCTC-Media Center*.  
Retrieved from IMCTC-Media Center:  
<https://imctc.org/English/Newsroom>

Islamic Military Counter-Terrorism Coalition. (2016). *Main Domains*. Retrieved from imctc domain: <https://imctc.org/English/FocusAreas>

Al-Ghafli, A. (2017). The Islamic Military Alliance to Fight Terrorism: Structure, Mission and Politics. *Journal of Regional Security*, 57-58.

Al-Ghafli, A. (2017). The Islamic Military Alliance to Fight Terrorism: Structure, Mission and Politics. *Journal of Regional Security*, 62-64.

